

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi dunia dewasa ini sangatlah pesat. Semua negara dan perusahaan multinasional bersiap untuk menghadapi era pasar bebas (Wulandari, 2014:1). Dengan semakin berkembangnya perekonomian dunia maka tidak dapat dihindari bahwa tuntutan terhadap perusahaan akan semakin besar pula. Perusahaan diharapkan untuk memperluas informasi akuntansi yang diungkapkan dalam laporan tahunan yang tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat (Anggraini, 2006:2). Hal ini menyebabkan perusahaan harus memperhitungkan berbagai kebutuhan pengambil keputusan ketika merumuskan kebijakan pengungkapan mereka. Meskipun tidak mungkin untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan semua pengambil keputusan, namun hal tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan (Haniffa, 2002:129).

Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan

untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan (Mulia dan Mutmainah, 2009:75).

Sayangnya meski semangat pelaporan CSR di Indonesia terus meningkat untuk mempromosikan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berperilaku etis, CSR kemudian merosot menjadi program-program eksploitatif yang terselubung. CSR hanya topeng dibalik upaya perusahaan untuk meningkatkan keuntungan mereka. CSR yang semula dimaksudkan untuk memberdayakan, justru berbalik arah memperdaya masyarakat (Rusdianto, 2014). Praktik CSR sering kali tidak memasukkan etika bisnis islam dalam bingkai ekonomi islam. Sehingga para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki (Edi Soeharto, 2010 dalam Rusdianto, 2014).

Kini konsep CSR tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang dalam ekonomi Islam. Konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah dan diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami (Jannah dan Asrori, 2016:2). Lembaga keuangan syariah sebagai sebuah entitas bisnis yang mempraktekkan prinsip-prinsip Islam dalam keseluruhan aktivitasnya sudah sering bersinggungan dengan persoalan tanggung jawab sosial. Bahkan salah satu misi penting dari Islam yang kemudian mempengaruhi lembaga keuangan syariah adalah kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep khalifah erat kaitannya

dengan pelestarian dan kesinambungan kehidupan yang notabene menjadi misi dari tanggung jawab sosial itu sendiri (Rama dan Meliawati, 2013).

Sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks islam, maka semakin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah (*Islamic Social Reporting* atau selanjutnya disebut indeks ISR) (Fitria dan Hartanti, 2010:10). Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing peneliti berikutnya mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas islam (Fitria dan Hartati, 2010:4). Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010:11).

Sayangnya dewasa ini pengukuran tanggung jawab sosial masih mengacu kepada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI) (Haniffa 2002). Pengukuran tersebut tentunya kurang tepat karena perusahaan yang diakui sebagai emiten syariah dan dinyatakan memenuhi syariat islam seharusnya mengungkapkan informasi yang membuktikan perusahaan tersebut beroperasi sesuai hukum islam (Fitria dan Hartanti, 2010:8). Hal ini tentunya dapat mengganggu penilaian dari pengambil keputusan muslim yang pada akhirnya akan berdampak pada kondisi spiritual mereka (Haniffa, 2002:129).

Sebuah perusahaan dalam suatu industri dapat memutuskan untuk lebih menitik beratkan pada satu pengungkapan item informasi tertentu yang mungkin tidak penting bagi perusahaan lain dalam industri yang berbeda. Namun teori

stakeholder memperlihatkan bahwa pemangku kepentingan mungkin menyadari pentingnya pelaporan sosial dan permintaan informasi yang harus diungkapkan tersebut. Demikian pula, dengan para pemangku kepentingan Muslim mungkin menyadari bahwa salah satu tanggung jawab sosial dari perusahaan adalah status haram halal dan karena itu, mereka menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih (Othman, et al, 2009:7).

Akhir-akhir ini marak adanya isu kontroversi mengenai pencantuman sertifikasi halal pada obat-obatan. Dimana penerbitan sertifikasi halal pada produk merupakan bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders*, khususnya konsumen. Namun, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ir. Lukmanul Hakim, M.Si. mengatakan, bahwa per Januari 2014, hanya 28 item dari sekitar 18.401 jenis obat yang beredar di masyarakat bersertifikat halal MUI, berarti 0,1 persen, ini sungguh darurat bencana,” ujarnya dalam dialog Menyoal Sertifikat Halal Obat-Obatan bersama Tim Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) di Jakarta, Selasa (4/2). Sampai saat ini, industri obat-obatan paling bandel kalau disuruh untuk memenuhi standar halal. Ada dua alasan yang selalu disampaikan saat membalas surat imbauan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kepala Bidang Informasi Halal Farid Mahmud menjelaskan, produsen obat selalu berlindung di balik kata darurat. Padahal, MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa level kedaruratan obat berbeda-beda. “Sepanjang dibutuhkan atau makin parah kalau tidak digunakan, itu darurat. Tapi, kalau obat flu, sakit kepala, tidak

termasuk,” ujarnya. Alasan berikutnya, produsen mengaku sulit mencari bahan baku pengganti. Pernyataan itu dianggap mengada-ada dan menggampangkan persoalan halal karena ada perusahaan yang sudah mengajukan sertifikat. Setelah dilakukan analisis, ternyata ada bahan baku obat-obatan yang memenuhi standar halal (Suvechi, 2015).

LPPOM menyebutkan, masih sangat minimnya obat-obatan bersertifikasi halal karena selama ini pengajuan halal hanya dilakukan secara sukarela oleh produsen. Dampaknya, masyarakat memang menjadi dalam keadaan kegelapan yang sengaja diciptakan. Umat Islam pun menjadi korban dengan mengonsumsi obat-obatan yang tidak terjamin kehalalannya (Abdullah, 2014).

Terjadinya fenomena tersebut karena pelaporan sosial syariah, *Islamic Social Reporting* (ISR) masih bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga pelaporan sosial setiap perusahaan menjadi tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut disebabkan karena tidak adanya standar yang baku secara syariah tentang pelaporan sosial syariah (Maulida, Yulianto, Asrori, 2014:2).

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, maka sudah seharusnya dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hal tersebut memberikan kesempatan besar dalam pengembangan konsep syariah di kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk pengembangan konsep syariah tersebut adalah pengukuran CSR secara islami atau yang sering disebut *Islamic Social Reporting* (ISR).

Beberapa penelitian terdahulu tentang ISR antara lain Haniffa (2002), Othman et al (2009), Othman dan Thani (2010). Sayangnya penelitian mengenai pelaksanaan ISR masih berorientasi di sektor perbankan syariah saja, seperti penelitian Fitriana dan Hartanti (2010), Zubairu dkk (2011), Rizkiningsih (2012), Sofyani dkk (2012), Khoirudin (2013), Fauziah dan Yudho J (2013). Sedangkan untuk sektor non perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal penelitian yang mengenai ISR belum banyak dilakukan sehingga kurang meluasnya konsep ISR terutama di Indonesia. Mengingat pasar modal syariah yang tumbuh pesat ditambah maraknya praktek pengungkapan CSR. Harusnya sebagai pelaku ekonomi syariah, emiten syariah juga harus melaporkan tanggung jawab sosial yang berbasis syariah (Maulida, Yulianto, Asrori, 2014).

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Widiawati dan Raharja (2012), serta Dewi (2012) menemukan hubungan positif ukuran perusahaan terhadap *islamic social reporting*, dimana perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar biasanya akan mengungkapkan lebih dari pada perusahaan kecil. Sedangkan Maulida, Yulianto, dan Asrori, (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

Profitabilitas juga mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting*. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Penelitian oleh Dewi (2012) dan Raditya (2012) menemukan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap ISR terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan. Namun, dalam penelitian Yuliana, Purnomosidhi, dan Sukoharsono (2008) profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan tanggungjawab sosial serta Astuti (2014) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR.

Kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan ISR sesuai dengan penelitian Ningrum dan Jayanto (2013), menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia. Lain halnya dengan penelitian Safira (2015) yang menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ISR, menghasilkan bahwa kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR perusahaan.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* antara lain adalah tipe industri, penerbitan sukuk, umur perusahaan, dan surat berharga syariah. Pada penelitian kali ini penulis mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulida, Yulianto dan Asrori (2014) yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis menambahkan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Selain itu terdapat perbedaan dalam periode penelitian, pada penelitian sebelumnya data yang digunakan yaitu periode tahun 2009-2012, sedangkan penelitian ini data yang digunakan pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2010-2014.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas serta dari penelitian sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010-2014.
2. Bagaimana *islamic social reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010-2014.
3. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap *islamic social reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010-2014 secara parsial.
4. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap *islamic social reporting* pada

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010-2014 secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010-2014.
2. Untuk mengetahui *islamic social reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010-2014.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap *islamic social reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010-2014 secara parsial.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap *islamic social reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010-2014 secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan, antara lain:

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap *islamic social reporting*, serta sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional dengan *islamic social reporting*.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memperkaya khasanah pengetahuan yang berhubungan dengan *Islamic Social Reporting* (ISR).

1. Menambah pengetahuan tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).